

## **ABSTRAK**

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Salah satu Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris adalah Akta Perseroan Terbatas, dimana suatu Perseroan Terbatas menjadi suatu Badan Hukum apabila telah Disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menggunakan Proses Elektronik yaitu Sistem Informasi Badan Hukum (SABH) dalam Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas agar menjadi lebih Mudah, Cepat, Akurat dan Transparan.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris. Sampel diambil dengan cara Non Random Purposive Sampling. Analisis dilakukan secara Deskriptif, yang akan Menggambarkan, Memaparkan dan Mengungkapkan bagaimana sesungguhnya Pelaksanaan Penggunaan AHU Online oleh para Notaris untuk menyelesaikan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

AHU Online adalah Sistem Administrasi Badan Hukum dalam Permohonan Penyelesaian Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara Elektronik menggunakan Media Internet secara Online. Penyelesaian Badan Hukum meliputi Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Permohonan tersebut dilakukan dengan mengisi Formulir Isian Akta Notaris antara lain Form Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Form Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Form Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dan Form Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran PT.

Sebuah Prosedur adalah Kunci dari suatu Sistem Hukum yang berlaku, tanpa prosedur yang benar dan sesuai dengan Undang-undang serta Ketentuan yang Berlaku, maka seluruh Sistem tersebut akan Timpang, sehingga Prosedur memegang peranan penting dalam sebuah keberlangsungan suatu Sistem.

Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai Kewenangan di Bidang Pelayanan dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, perlu untuk melakukan Pembinaan dan Mengimplementasikan hal-hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

*Kata Kunci : Perseroan Terbatas, AHU Online.*

## **A B S T R A C T**

### **JURIDICAL REVIEW OF MAKING DEED AND LEGALIZATION OF LIMITED COMPANY LAW BOARD USING THE ELECTRONICALLY ENHANCING OF AHU ONLINE APPLICATION SYSTEM**

Notary performance as the general officials rights to make the Authentic Note. One of Authentic Note that made by Notary is Limited Company Note, where a Limited Company become a Law Board if has been Legalized by Law and Human Rights Ministerial. Legalization process by Law and Human Rights Ministerial is ruled in Low of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 Concerning Limited Company using the Electronically Enhancing of Administration System Performance Legal Entity (SABH) in Legalization of Company Law Board in order to be Easier, Faster, Accurate and Transparent.

The used approach of this Research is Socio-Legal. Samples taken by nonrandom purposive sampling. Analysis done by descriptively to describe and to explain how the Practice of Resolving of Limited Company by AHU Online.

AHU Online is a Law Board Administration System in resolving of Limited Company Law Board that established Electronically and used the Internet media as Online. Resolving of Law Board involves Legalization, Aggrement, Reporting and Announcement of Changes of Base Budget of Limited Company. The claim established will fill the Formula of Notary Note such as Form for the Legalization of Limited Company Building Note, Form for Aggrement of Base Budget, Form for Report of Base Budget Changes and Form for Changes Reporting of Base Budget and Form Finishing of Limited Company.

Procedure is the Key of the Established Law, without Right Procedure that based on the Established Law, without Right Procedure that based on Established Rules and Regulations, the whole System will Fall therefore, Procedure has an important role in maintaining a System.

Civil Directorate, the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Justice and Human Rights, which has authority in the Field of Services and Legal Endorsement Limited Company, needs to make Improvements and Implement those things Mandated by Low of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 Concerning Limited Company.

*Key Words : Limited Company, AHU Online.*